BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mewujudkan good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengeluarkan peraturan daerah melalui Perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang rencana kerja pemerintah daerah. Yang kemudian disusul dengan peraturan darah tentang susunan organisasi perangkat daerah Nomor 12 Tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evalusi Pembangunan Daerah, Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun Dokumen Renja 2022 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Pasilambena Kepulauan Selayar.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sector pengembangan dan pembangunan wilayah di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Pasilambena.

1.1.1. Pengertian Renja

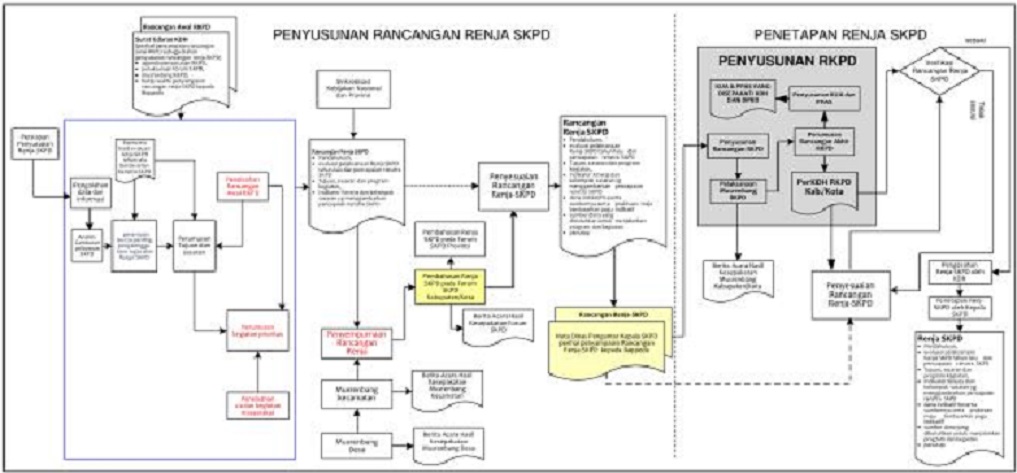
Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun encana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempunyai tugas mengembangkan dan membangun wilayah sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pad atahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses PenyusunanRenja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancang anawal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. SubstansiRenja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai

berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

* + - * Pembentukan Tim Penyusun Renja
      * Orientasi mengenai Renja
      * Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
      * Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh

kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih

terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak

terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

* + - * Pengolahan data dan informasi;
      * Analisis gambaran pelayanan OPD;
      * Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
      * Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
      * Telaah terhadap rancangan awal RKPD
      * Perumusan tujuan dan sasaran;
      * Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
      * Perumusan kegiatan prioritas;
* Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
* Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
* Pembahasan forum OPD; dan
* Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD.

f. Penetapan Renja.

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran di bawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan

rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasilambena Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selayan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012–2032.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas da Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Pasilambena kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Renja Kecamatan PasilambenaKabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk:

a. menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran,kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan PasilambenaKabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

b. bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis,komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar. Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Pasilambena Tahun 2022 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di sektor Perdagangan selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di sektor perdagangan serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 6 (enam) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Tahun 2021

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan caaian tahun 2023;

Bab III : Tujuan dan Sasaran OPD

Berisi tentang : telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

Bab V : Penutup

Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alatpertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indicator kinerja input, output dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance Gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Berdasarkan penetapan kinerja Tahun 2021, serta dengan merujuk pada hasil pelaksanaan program/kegiatan selama tahun bersangkutan, capaian kinerja Kecamatan pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 dapat digambarkan, sebagai berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2021

Kecamatan Pasilambena

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | URUSAN PEMERINTA HAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN PERMSALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|  | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | Kecamattan Pasilambena |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KABUPATEN | | | Rp 1,469,335,000 | Rp 1,371,770,152 | Sebagian besar kegiatan berjalan sesuai rencana | Koordinasi dan komunikasi intens |  |
|  |  |  |  |  |  | 93.36% |  |
|  |  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evauasi Kinerja Perangkat Daerah | | Rp 15,673,000 | Rp 10,973,000 | Capaian target terlaksana dengan baik |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 70.01% |  |  |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp 11,623,000 | Rp 6,923,000 | Pembatalan SPPD oleh PA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 59.56% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Target: 10 dok | Capaian : 10 dok |  |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 4,050,000 | Rp 4,050,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Target : 3 dok | Capaian: 3 dok |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Rp 969,371,000 | Rp 889,219,352 | Capaian target terlaksana dengan baik |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 91.73% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 923,050,000 | Rp 843,208,552 | Jumlah ASN berkurang |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 91.35% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp 7,220,000 | Rp 7,220,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Target : 1 dok | Capaian : 1 dok |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Rp 8,840,000 | Rp 8,529,800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 96.49% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Target : 4 dok | Capaian : 4 dok |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Rp 30,261,000 | Rp 30,261,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Rp 247,379,000 | Rp 244,639,600 | Capaian target terlaksana dengan baik |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 98.89% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 1,716,000 | Rp 1,716,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 27,785,500 | 27,785,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp 26,833,500 | Rp 26,833,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp 5,730,300 | Rp 5,651,600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 98.63% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp 3,487,700 | Rp 3,300,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 94.62% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Rp 28,816,000 | Rp 27,148,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 94.21% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 153,010,000 | Rp 152,205,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 99.47% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Rp 200,464,000 | Rp 193,940,200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 96.75% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 21,128,800 | Rp 18,374,600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 86.96% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 13,500,000 | Rp 13,500,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 165,835,200 | Rp 162,065,600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 97.73% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Rp 36,448,000 | Rp 32,998,000 | Dokumen aset masih terkendala pengguna aset belum lengkap | Pendataan aset terus dibenahi / disiplin pengguna aset |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90.53% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Target : 1 dok | Capaian : 1 dok |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 36,448,000 | Rp 32,998,000 | Tidak semua kendaaran dilakukan pemeliharaan | Upaya pemeliharaan yang konsisten |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90.53% |  |
|  |  |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | Rp 31,570,000 | Rp 31,155,000 | Kegiatan berjalan sesuai rencana |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 98.69% |  |  |
|  |  |  |  |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | Rp 15,094,000 | Rp 14,679,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 97.25% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Rp 15,094,000 | Rp 14,679,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 97.25% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Rp 16,476,000 | Rp 16,476,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 16,476,000 | Rp 16,476,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | Rp 25,000,000 | Rp 24,829,000 | Kegiatan berjalan sesuai rencana |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 99.32% |  |  |
|  |  |  |  |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Rp 25,000,000 | Rp 24,829,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 99.32% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Rp 25,000,000 | Rp 24,829,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 99.32% |  |  |  |
|  |  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | Rp 5,135,000 | Rp 5,135,000 | Kegiatan berjalan sesuai rencana |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Rp 5,135,000 | Rp 5,135,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Rp 5,135,000 | Rp 5,135,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | Rp 4,680,000 | Rp 4,680,000 | Kegiatan berjalan sesuai rencana |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Rp 4,680,000 | Rp 4,680,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Rp 4,680,000 | Rp 4,680,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pasilambena dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T- C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator | Target ( 000 ) | | Realisasi | | Proyeksi | | | Catatan Analisis |
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Anggaran Belanja | 1,689,670 | 1,335,771.333 | 1.535.720 | 1,335,771,333 | 16,000,000 | 1,750,000 | 1,850,000 | Pengingkatan anggaran terkait dengan kebutuhan pengembangan wilayah kecamatan |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Kecamatan Pasilambena sebagai berikut:

1. Dukungan IT dan system informasi pada besarnya pasar perdagangan dan perkebunan;
2. Kualitas Data;
3. Kompetensi SDM;
4. Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif;
5. Kemudahan pelayanan perizinan usaha;
6. Terbatasnya daya saing produk UMKM ;
7. Standar Pelayanan pengawasan barang dan jasa;
8. Pemberitaan media terkait informasi harga yang kurang tepat;
9. Mekanisme pengendalian distribusi barang serta stabilisasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya serta beredarnya barang-barang tiruan dan ilegal;
10. Maraknya rentenir;
11. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD;
12. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan tertib ukur serta standarisasi produk perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.

Adapun tantangan pengembangan wilayah Kecamatan Pasilambena dengan menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

**Analisis Lingkungan Internal**

**Faktor Kekuatan ( Strong )**

1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2008 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kecamatan Pasilambena yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabatfungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai etos kerja yang tinggi.

**Weaktor Kelemahan ( Weakness )**

1. Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Pasilambena dan di tingkat desa;
2. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
3. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

**Analisis Lingkungan Eksternal**

**Faktor Peluang ( Opportunity )**

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah mulai tertata dengan baik.
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Pasilambena.
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerahdalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
5. Letak Kecamatan Pasilambena di tenggara yang berbatas laut langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur di selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara di Timur.
6. Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2016 – 2021 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar;

**Faktor Ancaman ( Threat )**

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pasilambena;
4. Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.
5. Letak geografis kepulauan yang jauh dari ibukota kabupaten yang sering luput dari perhatian pemerintah dan legislatif.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2023 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, Hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan\_Selayar.

|  |
| --- |
| Tabel T-C.31 |
| Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 |
| Kecamatan Pasilambena |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan** | **Sasaran** | **KODE** | **Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)** | | | **Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)** | **Tahun 2** | | **Unit Kerja OPD Penang gung Jawab** | **Lokasi** |
| **2022** | |
| **Target** | **Rp.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Meningkatkan Reformasi Birokrasi Daerah |  | x.xx.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | Meningkatnya pengelolaan adiminstrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% |  |  |  |
|  | Meningkatnya Nilai SAKIP | x.xx.01.2.01 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | % ketersediaan dokumen kinerja |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.01.01 |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan |  |  | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.01.02 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dok | 4,700,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.01.03 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dok | 4,700,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.01.04 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dok | 4,700,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.01.05 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dok | 4,700,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.01.06 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 dok | 7,575,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.01.07 |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah evaluasi yang dilaksanakan |  |  |  |  |
|  | Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Daerah | x.xx.01.2.02. |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | % ketersediaan dokumen keuangan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.02.01 |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 950,166,764 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.02.02 |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah SOP dipersiapkan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.02.03 |  |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah verifikasi keuangan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.02.04 |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah rekon akutansi yang dikoordinasikan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.02.05 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 dok | 12,925,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.02.06 |  |  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Dokumen tanggapan pemeriksaan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.02.07 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Lealisasi Fisik Keuangan | 2 dok | 25,145,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.02.08 |  |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan prognosis realiasasi keuangan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.03 |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | % ketersediaan dokumen BMD |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.03.01 |  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen perencanaan kebutuhan BMD |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.03.02 |  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah kegiatan pemangamanan BMD |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.03.03 |  |  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah rekon BMD yang dikoordinasikan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.03.04 |  |  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah kegiatan Pengawasan BMD |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.03.05 |  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Aset BMD | 1 dok | 8,450,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.03.06 |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan inventaris BMD |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.03.07 |  |  | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah laporan pemanfaatan BMD |  |  |  |  |
|  | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan | x.xx.01.2.05. |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | % ketersediaan dokumen kepegawaian |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.05,.01 |  |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Sarana dan Prasarana |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.05.02 |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas lengkap | 100% | - | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.05.03 |  |  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen Administrasi kepegawaian |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.05.04 |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Tersusunnya informasi kepegawaian | 1 dok | 7,575,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.05.05 |  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah pelaksanaan monev kinerja |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.05.06 |  |  | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah pensiunan yang dipulangkan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.05.07 |  |  | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Jumlah pegawai yang gugur dalam tugas |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.05.08 |  |  | Pemindahan Tugas ASN | Jumlah pemindah-tugasan ASN |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.05.09 |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah perserta PIM | 100% | - | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.05.10 |  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah pelaksanaan sosialisasi |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.05.11 |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bimtek yang dilaksanakan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.06. |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | % ketersediaan administrasi umum perkantoran |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.6.01 |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100% | 2,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.06.02 |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100% | 16,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.06.03 |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan rumah tangga |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.06.04 |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 100% | 22,512,388 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.06.05 |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100% | 6,500,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.06.06 |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 100% | 4,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.06.07 |  |  | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bahan yang dipersiapkan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.06.08 |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi | 100% | 24,780,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.06.09 |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan | 100% | 164,750,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.06.10 |  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Arsip Dinamis yang ditata-usahakan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.06.11 |  |  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah fasilitas pendukung sistem |  |  |  |  |
|  | Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Daerah | x.xx.01.2.07. |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | % Ketersediaan BMD |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.07.01 |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang dipersipakan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.07.02 |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan operasional yang dipersiapkan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.07.05 |  |  | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang dipersiapkan | 100% | - | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.07.06 |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan yang dipersiapkan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.07.07 |  |  | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah asset tetap yang dipersiapkan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.07.09 |  |  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipersiapkan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.07.10 |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 unit | 15,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.07.11 |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung yang dipersiapkankantor | 100% | - | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.08. |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | % ketersediaan jasa penunjang perkanttoran |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.08.01 |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jasa surat menyurat yang dipersiapkan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.08.02 |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah komudikasi, air dan listrik yang disediakan | 100% | - | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.08.03 |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100% | 15,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.08.04 |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100% | 57,055,200 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.09. |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | % pemeliharan BMD |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.09.05 |  |  | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel yang dipelihara |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.09.06 |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | 9 unit | 44,630,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.09.07 |  |  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah aset yang dipelihara | 100% | - | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.09.08 |  |  | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah aset yang dipelihara |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.09.09 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | 100% | 190,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.09.10 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang direhabilitasi |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.09.11 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang direhabilitasi |  |  |  |  |
|  |  | x.xx.01.2.09.12 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Jumlah tanah yang dipelihara |  |  |  |  |
|  |  | x.xx.01.2.10. |  | Peningkatan Pelayanan BLUD | |  |  |  |  |  |
|  |  | x.xx.01.2.10.01 |  |  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01 | KECAMATAN | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | Peningkatan Pelayanan di Tk. Kecamatan dan Desa/Kelurahan | 30 menit |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.01 |  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | % Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.01.01 |  |  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Perencanaan yang dikoordinasikan |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.01.02 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.02. |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | % Urusan pemerintahan yang diselenggaran |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.02.01 |  |  | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Kegiatan pelayanan yang direncanakan |  |  |  |  |
|  | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 7.01.02.2.02.02 |  |  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah percepatan pencapaian standar pelayanan minimal yang difasilitasi | 6 desa | - | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  |  |  | 7.01.02.2.02.03 |  |  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Efektifitas Pelayanan kepada masyrakat yang ditingkatkan |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.03. |  | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | % Sarana &Prasaranan Umum yang dipelihara |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.03.01 |  |  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah sarana dan prasarana Pelayanan umum yang dipelihara |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.03.02 |  |  | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasaranan dan Fasilitas Pelayananan Umum yang dipelihara |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.04. |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | %Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.04.01 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.04.02 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Non Perizinan yang dilaksanakan |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.04.03 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah urusan pemerintahan yang terkait kewenangan yang dilimpahkan | 1 dok | 10,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembngunan | 80% |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.03.2.01. |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | % Kegiatan Pemberdayaan Desa |  |  |  |  |
|  | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 7.01.03.2.01.01 |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah masyarakat yang berpartisifasi dalam Forum Musrenbang Desa | 1 dok | 9,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | 7.01.03.2.01.02 |  |  | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang tersinkronisasi | 2 dok | 24,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | 7.01.03.2.01.03 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan |  | 10,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | Penurunan jumlah kriminalitas dalam masyarakat | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.04.2.01. |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | % Penurunan Jumlah Kriminal dalam Masyarakat | 100% |  |  |  |
|  | Meningkatkan Pembinaan Sosial Dan Keagamaan | Meningkatnya Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dengan mengaktualisaikan pada kehidupan sosial | 7.01.04.2.01.01 |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Koordiasi sinergitas | 1 dok | 9,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Keagamaan | 7.01.04.2.01.02 |  |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah koordinasi kegiatan harmonisasi dalam masyarakat | 1 dok | 12,280,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | Penuruman Konflik Sosial dan Keagamaan di kecamatan | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.05.2.01. |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | % Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan |  |  |  |  |
|  |  | Meningkatnya Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dengan mengaktualisaikan pada kehidupan sosial | 7.01.05.2.01.01 |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan | 2 kegiatan | 40,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.02 |  |  | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.03 |  |  | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Pembinaan |  |  |  |  |
|  |  | Meningkatnya Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dengan mengaktualisaikan pada kehidupan sosial ) | 7.01.05.2.01.04 |  |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah pembinaan yang dilakukan | 1 kegiatan | - | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.05 |  |  | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah laporan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 1 lap | 7,000,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila | Jumlah kegiatan |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.07 |  |  | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah urusan pemerintahan |  |  |  |  |
|  | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | 7.01.05.2.01.08 |  |  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah koordinasi forum pimpinan | 1 dok | 7,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | % Urusan pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.06.2.01 |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | % pembinaan dan Pengawasan yagn difasiitasi, direkomendasi, dikoordinasikan |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.01 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi |  | - |  |  |
|  | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | 7.01.06.2.01.02 |  |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah pembinaan tata pemerintahan desa yang difasilaitasi | 1 dok | 5,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | 7.01.06.2.01.03 |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah pengelolaan keuangan dan aset desa yang difasilitasi | 1 dok | 7,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.04 |  |  | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah penerapan dan penegakan perundang-undangan yang difasiitasi |  | - |  |  |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.05 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah pelaksanaan kepala desa yang difasilitasi |  | - |  |  |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.06 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang difasilaitasi |  | - |  |  |
|  | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | 7.01.06.2.01.07 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yagn difaslitasi | 1 dok | 5,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | 7.01.06.2.01.08 |  |  | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yagn direkomendasikan |  | - |  |  |
|  | 7.01.06.2.01.09 |  |  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah asistensi apb desa yang difasilitasi | 1 dok | 7,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | 7.01.06.2.01.10 |  |  | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah pembangunan kawasan yang difasilitsi | 1 dok | 6,252,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | 7.01.06.2.01.11 |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi | 1 dok | 7,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | 7.01.06.2.01.12 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi |  | - |  |  |
|  | 7.01.06.2.01.13 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang difasilitasi | 1 dok | 7,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | 7.01.06.2.01.14 |  |  | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga | Jumlah kerjasama yang difasilitasi |  | - |  |  |
|  | 7.01.06.2.01.15 |  |  | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang difasilitasi | 1 dok | 7,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | 7.01.06.2.01.16 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasiitasi |  | - |  |  |
|  | 7.01.06.2.01.17 |  |  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Pendampingan Desa yang dikoorinasikan |  | - |  |  |
|  | 7.01.06.2.01.18 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah pengawasan pembangunan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan | 1 dok | 7,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  |  |  |  |  |  |  | | **1,779,396,352** | |  |  |

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kecamatan yang kemudian disandingkan dengan RPJMD 2021-2026, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat kecamatan saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan pengembangan dan pembangunan wilayah Kecamatan Pasilambena sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja yang selaras dan dengan mempertimbangkan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan dan garis kebijakan dalam RPJMD 2021-2026.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Program Bupati Kepulauan Selayar 2021 – 2026

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Pasilambena sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :

“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.

Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri. Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan visi Bandar Maritim ini adalah:

1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional;

2. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;

3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan;

4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

5. Bandar maritim didukung oleh tiga pilar pembangunan yaitu:

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pammatata dan sekitarnya, ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni:

Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng;

Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-Jampea;

Sub-Kawasan 3 (tiga) pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;

Sub-Kawasan 4 (empat) pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi-Gusung, didukung oleh tujuh sub-kawasan yakni:

a. Sub-Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang;

b. Sub-Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya;

c. Sub-Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang;

d. Sub-Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang;

e. Sub-Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi;

f. Sub-Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi;

g. Sub-Kawasan 7 pada Kawasan Pantai Pulau Panjang.

3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub-sentra:

a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang;

b. Sub-Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi;

c. Sub-Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea;

d. Sub-Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;

e. Sub-Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Kawasan Timur Indonesia: berada pada kawasan timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistic yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Dimana dalam mencapai visi tersebut di dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dielaborasi sebagai berikut :

Misi dalam RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum dalam mewujudkan visi. Misi yang diajukan oleh kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan

2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan

3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan

5. Meningkatan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan

6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Tujuan dalam RPJMD ini diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan selama periode RPJMD. Menurut Permendagri 86/2017, rumusan tujuan pembangunan memiliki kriteria:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi;

2. Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;

3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;

4. Dapat diukur dalam jangka waktu lima tahunan; dan

5. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Perumusan visi secara garis besar dengan langkah-langkah:

1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;

2. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;

3. Merumuskan indikator tujuan yang memenuhi kriteria SMART-C.

Sasaran dalam RPJMD ini diartikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Kriteria sasaran adalah:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;

2. Satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;

3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan

4. Memenuhi kriteria SMART-C.

Sasaran dirumuskan melalui langkah-langkah:

1. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;

2. Merumuskan indikator sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD yang relevan; dan

3. Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pasilambena

Berdasarkan tujuan yang terdapat dalam Renstra 2021-2026 Kecamatan Pasilambena, akan diketahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurung waktu 1 sampai 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta factor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan pasilambena tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Sasaran** | **Target Kinerja Sasaran Pada Tahun** | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan  (M-1) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 70.5% | 72.7% | 75.2% | 80.2% | 85.2% |
| Meningkatnya Nilai SAKIP | Nilai SAKIP Kecamatan | 60,2 | 65,2 | 70.2 | 75.2 | 80.0 |
| Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan Sesuai Standar Akutansi Pemenitahan | sesuai | sesuai | sesuai | sesuai | sesuai |
| **2.** | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (M-2) | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | % Meningkatnya Fungsi Lembaga Desa yang Dikoordinasikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa | % Urusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **3** | Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan (M-5) | Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial | Indeks Ketahanan Sosial | 0,6950 | 0,7050 | 0,7150 | 0,7200 | O,7200 |
| Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan | Angka Kriminalitas | 9,50 | 8,50 | 8,00 | 7,20 | 6,25 |

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD.

Program dan Kegiatan dimaksud hanya program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasilambena di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

* 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
5. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
6. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
9. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
10. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
11. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17. Fasilitasi Kunjungan Tamu
18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
19. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
20. Pengadaan Mebel
21. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
23. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
24. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
26. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
27. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
28. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
29. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
30. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

UNSUR KEWILAYAHAN

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pendukung terlaksaananya pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

* + 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
   * 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisifasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

Kegiatan :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pasilambena. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
3. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya urusan pemerintahan secara umum yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pasilambena. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
4. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan fasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, bak dari segi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, pembangunan kawasan, dan demikian pula dengan pula badan permusyawaratan desa. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
5. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
6. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
8. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
9. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
10. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas sesuai dengan Restra Kecamatan Pasilambena Tahun 2021 – 2026, sebagi berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan** | **Sasaran** | **KODE** | **Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)** | | | **Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)** | **Tahun 2** | | **Unit Kerja OPD Penang gung Jawab** | **Lokasi** |
| **2022** | |
| **Target** | **Rp.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Meningkatkan Reformasi Birokrasi Daerah |  | x.xx.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | Meningkatnya pengelolaan adiminstrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% |  |  |  |
|  | Meningkatnya Nilai SAKIP | x.xx.01.2.01 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | % ketersediaan dokumen kinerja |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.01.01 |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan |  |  | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.01.02 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dok | 4,700,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.01.03 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dok | 4,700,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.01.04 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dok | 4,700,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.01.05 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dok | 4,700,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.01.06 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 dok | 7,575,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.01.07 |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah evaluasi yang dilaksanakan |  |  |  |  |
|  | Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Daerah | x.xx.01.2.02. |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | % ketersediaan dokumen keuangan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.02.01 |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 950,166,764 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.02.02 |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah SOP dipersiapkan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.02.03 |  |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah verifikasi keuangan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.02.04 |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah rekon akutansi yang dikoordinasikan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.02.05 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 dok | 12,925,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.02.06 |  |  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Dokumen tanggapan pemeriksaan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.02.07 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Lealisasi Fisik Keuangan | 2 dok | 25,145,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.02.08 |  |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan prognosis realiasasi keuangan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.03 |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | % ketersediaan dokumen BMD |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.03.01 |  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen perencanaan kebutuhan BMD |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.03.02 |  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah kegiatan pemangamanan BMD |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.03.03 |  |  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah rekon BMD yang dikoordinasikan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.03.04 |  |  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah kegiatan Pengawasan BMD |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.03.05 |  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Aset BMD | 1 dok | 8,450,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.03.06 |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan inventaris BMD |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.03.07 |  |  | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah laporan pemanfaatan BMD |  |  |  |  |
|  | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan | x.xx.01.2.05. |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | % ketersediaan dokumen kepegawaian |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.05,.01 |  |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Sarana dan Prasarana |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.05.02 |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas lengkap | 100% | - | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.05.03 |  |  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen Administrasi kepegawaian |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.05.04 |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Tersusunnya informasi kepegawaian | 1 dok | 7,575,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.05.05 |  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah pelaksanaan monev kinerja |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.05.06 |  |  | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah pensiunan yang dipulangkan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.05.07 |  |  | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Jumlah pegawai yang gugur dalam tugas |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.05.08 |  |  | Pemindahan Tugas ASN | Jumlah pemindah-tugasan ASN |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.05.09 |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah perserta PIM | 100% | - | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.05.10 |  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah pelaksanaan sosialisasi |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.05.11 |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bimtek yang dilaksanakan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.06. |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | % ketersediaan administrasi umum perkantoran |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.6.01 |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100% | 2,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.06.02 |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100% | 16,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.06.03 |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan rumah tangga |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.06.04 |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 100% | 22,512,388 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.06.05 |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100% | 6,500,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.06.06 |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 100% | 4,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.06.07 |  |  | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bahan yang dipersiapkan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.06.08 |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi | 100% | 24,780,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.06.09 |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan | 100% | 164,750,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.06.10 |  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Arsip Dinamis yang ditata-usahakan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.06.11 |  |  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah fasilitas pendukung sistem |  |  |  |  |
|  | Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Daerah | x.xx.01.2.07. |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | % Ketersediaan BMD |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.07.01 |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang dipersipakan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.07.02 |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan operasional yang dipersiapkan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.07.05 |  |  | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang dipersiapkan | 100% | - | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.07.06 |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan yang dipersiapkan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.07.07 |  |  | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah asset tetap yang dipersiapkan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.07.09 |  |  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipersiapkan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.07.10 |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 unit | 15,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.07.11 |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung yang dipersiapkankantor | 100% | - | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.08. |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | % ketersediaan jasa penunjang perkanttoran |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.08.01 |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jasa surat menyurat yang dipersiapkan |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.08.02 |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah komudikasi, air dan listrik yang disediakan | 100% | - | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.08.03 |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100% | 15,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.08.04 |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100% | 57,055,200 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.09. |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | % pemeliharan BMD |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.09.05 |  |  | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel yang dipelihara |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.09.06 |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | 9 unit | 44,630,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.09.07 |  |  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah aset yang dipelihara | 100% | - | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.09.08 |  |  | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah aset yang dipelihara |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.09.09 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | 100% | 190,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | x.xx.01.2.09.10 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang direhabilitasi |  |  |  |  |
|  | x.xx.01.2.09.11 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang direhabilitasi |  |  |  |  |
|  |  | x.xx.01.2.09.12 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Jumlah tanah yang dipelihara |  |  |  |  |
|  |  | x.xx.01.2.10. |  | Peningkatan Pelayanan BLUD | |  |  |  |  |  |
|  |  | x.xx.01.2.10.01 |  |  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01 | KECAMATAN | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | Peningkatan Pelayanan di Tk. Kecamatan dan Desa/Kelurahan | 30 menit |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.01 |  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | % Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.01.01 |  |  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Perencanaan yang dikoordinasikan |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.01.02 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.02. |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | % Urusan pemerintahan yang diselenggaran |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.02.01 |  |  | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Kegiatan pelayanan yang direncanakan |  |  |  |  |
|  | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 7.01.02.2.02.02 |  |  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah percepatan pencapaian standar pelayanan minimal yang difasilitasi | 6 desa | - | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  |  |  | 7.01.02.2.02.03 |  |  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Efektifitas Pelayanan kepada masyrakat yang ditingkatkan |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.03. |  | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | % Sarana &Prasaranan Umum yang dipelihara |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.03.01 |  |  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah sarana dan prasarana Pelayanan umum yang dipelihara |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.03.02 |  |  | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasaranan dan Fasilitas Pelayananan Umum yang dipelihara |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.04. |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | %Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.04.01 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.04.02 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Non Perizinan yang dilaksanakan |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.04.03 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah urusan pemerintahan yang terkait kewenangan yang dilimpahkan | 1 dok | 10,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembngunan | 80% |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.03.2.01. |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | % Kegiatan Pemberdayaan Desa |  |  |  |  |
|  | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 7.01.03.2.01.01 |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah masyarakat yang berpartisifasi dalam Forum Musrenbang Desa | 1 dok | 9,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | 7.01.03.2.01.02 |  |  | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang tersinkronisasi | 2 dok | 24,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | 7.01.03.2.01.03 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan |  | 10,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | Penurunan jumlah kriminalitas dalam masyarakat | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.04.2.01. |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | % Penurunan Jumlah Kriminal dalam Masyarakat | 100% |  |  |  |
|  | Meningkatkan Pembinaan Sosial Dan Keagamaan | Meningkatnya Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dengan mengaktualisaikan pada kehidupan sosial | 7.01.04.2.01.01 |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Koordiasi sinergitas | 1 dok | 9,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Keagamaan | 7.01.04.2.01.02 |  |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah koordinasi kegiatan harmonisasi dalam masyarakat | 1 dok | 12,280,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | Penuruman Konflik Sosial dan Keagamaan di kecamatan | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.05.2.01. |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | % Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan |  |  |  |  |
|  |  | Meningkatnya Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dengan mengaktualisaikan pada kehidupan sosial | 7.01.05.2.01.01 |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan | 2 kegiatan | 40,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.02 |  |  | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.03 |  |  | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Pembinaan |  |  |  |  |
|  |  | Meningkatnya Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dengan mengaktualisaikan pada kehidupan sosial ) | 7.01.05.2.01.04 |  |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah pembinaan yang dilakukan | 1 kegiatan | - | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.05 |  |  | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah laporan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 1 lap | 7,000,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila | Jumlah kegiatan |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.07 |  |  | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah urusan pemerintahan |  |  |  |  |
|  | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | 7.01.05.2.01.08 |  |  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah koordinasi forum pimpinan | 1 dok | 7,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | % Urusan pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.06.2.01 |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | % pembinaan dan Pengawasan yagn difasiitasi, direkomendasi, dikoordinasikan |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.01 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi |  | - |  |  |
|  | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | 7.01.06.2.01.02 |  |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah pembinaan tata pemerintahan desa yang difasilaitasi | 1 dok | 5,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | 7.01.06.2.01.03 |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah pengelolaan keuangan dan aset desa yang difasilitasi | 1 dok | 7,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.04 |  |  | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah penerapan dan penegakan perundang-undangan yang difasiitasi |  | - |  |  |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.05 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah pelaksanaan kepala desa yang difasilitasi |  | - |  |  |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.06 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang difasilaitasi |  | - |  |  |
|  | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | 7.01.06.2.01.07 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yagn difaslitasi | 1 dok | 5,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | 7.01.06.2.01.08 |  |  | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yagn direkomendasikan |  | - |  |  |
|  | 7.01.06.2.01.09 |  |  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah asistensi apb desa yang difasilitasi | 1 dok | 7,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | 7.01.06.2.01.10 |  |  | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah pembangunan kawasan yang difasilitsi | 1 dok | 6,252,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | 7.01.06.2.01.11 |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi | 1 dok | 7,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | 7.01.06.2.01.12 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi |  | - |  |  |
|  | 7.01.06.2.01.13 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang difasilitasi | 1 dok | 7,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | 7.01.06.2.01.14 |  |  | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga | Jumlah kerjasama yang difasilitasi |  | - |  |  |
|  | 7.01.06.2.01.15 |  |  | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang difasilitasi | 1 dok | 7,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | 7.01.06.2.01.16 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasiitasi |  | - |  |  |
|  | 7.01.06.2.01.17 |  |  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Pendampingan Desa yang dikoorinasikan |  | - |  |  |
|  | 7.01.06.2.01.18 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah pengawasan pembangunan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan | 1 dok | 7,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  |  |  |  |  |  |  | | **1,779,396,352** | |  |  |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kecamatan Pasilambena merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pasilambena. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Pasilambena kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Pasilambena. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pasilambena.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Programprogram prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD SUL-SEL, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **KODE** | **Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)** | | | **Pagu Indikatif** |
| **Rp.** |
|  | x.xx.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | |  |
|  | x.xx.01.2.01 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |  |
|  | x.xx.01.2.01.02 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4,700,000 |
|  | x.xx.01.2.01.03 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4,700,000 |
|  | x.xx.01.2.01.04 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4,700,000 |
|  | x.xx.01.2.01.05 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 4,700,000 |
|  | x.xx.01.2.01.06 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7,575,000 |
|  | x.xx.01.2.02.01 |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 950,166,764 |
|  | x.xx.01.2.02.05 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12,925,000 |
|  | x.xx.01.2.02.07 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 25,145,000 |
|  | x.xx.01.2.03 |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |  |
|  | x.xx.01.2.03.05 |  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 8,450,000 |
|  | x.xx.01.2.05. |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |  |
|  | x.xx.01.2.05.04 |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 7,575,000 |
|  | x.xx.01.2.06. |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | |  |
|  | x.xx.01.2.6.01 |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2,000,000 |
|  | x.xx.01.2.06.02 |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 16,000,000 |
|  | x.xx.01.2.06.04 |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 22,512,388 |
|  | x.xx.01.2.06.05 |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6,500,000 |
|  | x.xx.01.2.06.06 |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4,000,000 |
|  | x.xx.01.2.06.08 |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 24,780,000 |
|  | x.xx.01.2.06.09 |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 164,750,000 |
|  | x.xx.01.2.07. |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |  |
|  | x.xx.01.2.07.10 |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15,000,000 |
|  | x.xx.01.2.08. |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |  |
|  | x.xx.01.2.08.03 |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15,000,000 |
|  | x.xx.01.2.08.04 |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 57,055,200 |
|  | x.xx.01.2.09. |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |  |
|  | x.xx.01.2.09.06 |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 44,630,000 |
|  | x.xx.01.2.09.09 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 190,000,000 |
|  | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | |  |
|  | 7.01 | KECAMATAN | | |  |
|  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | |  |
|  | 7.01.02.2.04. |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |  |
|  | 7.01.02.2.04.03 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 10,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | |  |
|  | 7.01.03.2.01. |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |  |
|  | 7.01.03.2.01.01 |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 9,000,000 |
|  | 7.01.03.2.01.02 |  |  | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 24,000,000 |
|  | 7.01.03.2.01.03 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | |  |
|  | 7.01.04.2.01. |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |  |
|  | 7.01.04.2.01.01 |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 9,000,000 |
|  | 7.01.04.2.01.02 |  |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12,280,000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | |  |
|  | 7.01.05.2.01. |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | |  |
|  | 7.01.05.2.01.01 |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 40,000,000 |
|  | 7.01.05.2.01.05 |  |  | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 7,000,000 |
|  | 7.01.05.2.01.08 |  |  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 7,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | |  |
|  | 7.01.06.2.01 |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |  |
|  | 7.01.06.2.01.02 |  |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 5,000,000 |
|  | 7.01.06.2.01.03 |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 7,000,000 |
|  | 7.01.06.2.01.07 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 5,000,000 |
|  | 7.01.06.2.01.09 |  |  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 7,000,000 |
|  | 7.01.06.2.01.10 |  |  | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 6,252,000 |
|  | 7.01.06.2.01.11 |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 7,000,000 |
|  | 7.01.06.2.01.13 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 7,000,000 |
|  | 7.01.06.2.01.15 |  |  | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 7,000,000 |
|  | 7.01.06.2.01.18 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 7,000,000 |
|  |  |  |  | **1,779,396,352** | |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. serta memperhatikan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, dengan demikian terjalin keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan maupun nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2023.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Kecamatan Pasilambena, sebagai berikut :

1. Penentuan skala prioritas pada kegiatan yang sifatnya penting dan pokok untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Kecamatan Pasilambena.

2. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.

3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama strategis yang bersinergis.

4. Kontribusi pada semua tingkatan stageholder formal maupun nonformal Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya pada wilyah Kecamatan Pasilambena dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya sangat besar oleh karena itu harus selalu dikembangkan secara berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, yang secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan

Latokdok, Februari 2022

Camat Pasilambena

**PATTA BAU, S.Sos, M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP. : 19760611 200502 1 010